

**ANALISIS SEBELUM DAN SESUDAH DIWAJIBKANNYA  
PENERAPAN *IT INVENTORY* TERHADAP LAMANYA  
PENYELESAIAN AUDIT KEPABEANAN**

**(*AUDIT DELAY*)**

**Studi Empiris Pada Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor  
Tujuan Ekspor**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**VETTY RIZA ASTIKA**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS SEBELUM DAN SESUDAH DIWAJIBKANNYA PENERAPAN *IT INVENTORY* TERHADAP LAMANYA PENYELESAIAN AUDIT KEPABEANAN (*AUDIT DELAY*)**

**Studi Empiris Pada Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor  
Tujuan Ekspor**

**Oleh**

**VETTY RIZA ASTIKA**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris adakah perbedaan sebelum dan sesudah diwajibkannya penerapan *IT inventory* terhadap lamanya waktu penyelesaian audit kepabeanan (*audit delay*) pada perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Impor (KITE) tahun 2012 dan 2014. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* menghasilkan 12 sampel. Teknik analisis penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji beda berpasangan (*paired samples t-test*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan penerima fasilitas KITE yang diaudit pada tahun 2012 rata-rata membutuhkan waktu 211,08 hari untuk proses audit. Sedangkan perusahaan penerima fasilitas KITE yang diaudit pada tahun 2014 rata-rata membutuhkan waktu 155,58 hari untuk proses audit. Diwajibkannya penerapan *IT inventory* selaku variabel independen memiliki hubungan negatif signifikan terhadap lamanya penyelesaian audit kepabeanan (*audit delay*).

Kata kunci : *IT inventory* dan *audit delay*.

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS BEFORE AND AFTER THE MANDATORY OF IT INVENTORY'S APPLICATION ON THE LENGTH OF CUSTOMS AUDIT COMPLETION (AUDIT DELAY)**

**(Empirical Study on Companies Receiving Import Ease to Export Facility)**

**By**

**VETTY RIZA ASTIKA**

*The aim of this research is to examine empirically the difference before and after the mandatory of IT inventory's application on the length of customs audit completion (audit delay) in recipient company of Ease Import for Export Destination (KITE) facilities in 2012 and 2014. The samples are selected by purposive sampling method which result 12 samples. Analysis methods use the statistic descriptive, the assumptions of classical test, and compare means test (paired samples t-test). The results of this study show that recipient company of KITE facilities which audited in 2012 spent average 211,08 days for audit process. Meanwhile, recipient company of KITE facilities which audited in 2014 spent average 155,58 days for audit process. The mandatory of IT inventory's application as the independence variable has negatively significant correlation on the length of customs audit completion (audit delay).*

*Keywords: IT inventory and audit delay.*

**ANALISIS SEBELUM DAN SESUDAH DIWAJIBKANNYA  
PENERAPAN *IT INVENTORY* TERHADAP LAMANYA  
PENYELESAIAN AUDIT KEPABEANAN  
(*AUDIT DELAY*)**

**Studi Empiris Pada Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor  
Tujuan Ekspor**

Oleh

**Vetty Riza Astika**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

**SARJANA EKONOMI**

Pada

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

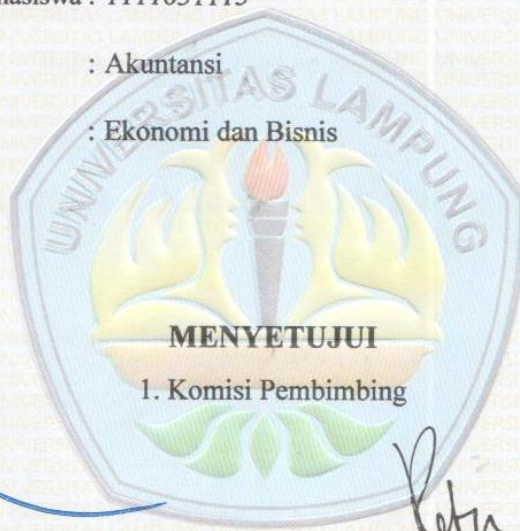
Judul Skripsi : **ANALISIS SEBELUM DAN SESUDAH  
DIWAJIBKANNYA PENERAPAN  
IT INVENTORY TERHADAP LAMANYA  
PENYELESAIAN AUDIT KEPABEANAN  
(AUDIT DELAY)**

Nama Mahasiswa : **Vetty Riza Astika**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1111031115

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



**R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., C.A., CPA.**  
NIP 19590909 198903 1 004

**Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Sc., Akt.**  
NIP 19780603 200604 2 001

2. Ketua Jurusan Akuntansi

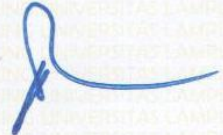
**Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.**  
NIP 19620612 199010 2 001



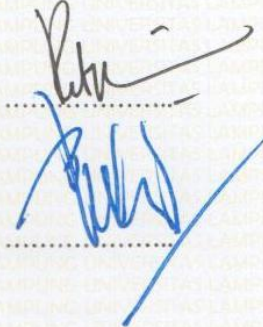
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., C.A., CPA. ....

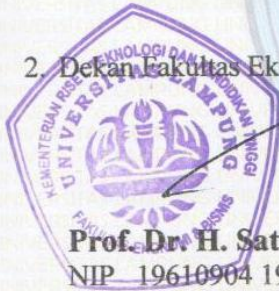


Sekretaris : Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Sc., Akt. ....



Penguji Utama : Drs. A. Zubaidi Indra, M.M., C.A., CPA. ....

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.  
NIP. 19610904 198703 1 011

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juni 2016

## PERNYATAAN SKRIPSI MAHASISWA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vetty Riza Astika

NPM : 1111031115

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada tidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Bandar Lampung, Juni 2016

Yang Menyatakan



  
Vetty Riza Astika  
NPM 1111031115

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 13 Oktober 1993, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, dari Bapak Kateni dan Ibu Astuti. Penulis menempuh pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Taruna Jaya yang diselesaikan pada tahun 1999. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Negeri 1 Sidosari pada tahun 2005, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 8 Bandar Lampung hingga tahun 2008 dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 2011.

Pada Tahun 2011, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama menempuh perkuliahan, penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung Komisariat Ekonomi Unila sebagai anggota biasa sejak tahun 2011-sekarang, Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (HIMAKTA FEB) Unila sebagai Kepala Bidang Peningkatan Kemampuan Akademik Mahasiswa periode 2013-2014 dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (DPM FEB) Unila sebagai Wakil Ketua I periode 2014-2015.



## PERSEMBAHAN



Alhamdulillah, Segala Puji hanya bagi Allah. Kupersembahkan karya kecilku ini kepada:

Bapak dan Ibuku yang selalu mendoakan, membimbing, mendukung tiap langkahku dan mencurahkan segenap kasih sayang yang begitu besar untukku. Kedua adikku tersayang, Yogi Adi Wijaya dan Muhammad Farhan Nugraha yang selalu berhasil menjadi motivasi terbesarku, menjadi penyemangatku serta mewarnai hari-hariku.

Seseorang, yang kelak akan menjadi imamku.

## **MOTTO**

“Fabiayyi ‘Alaa Irobbikuma Tukadziban”  
(QS. Ar Rahman: 55)

“You will see me fail, I guarantee it. But you will never see me quit.”  
(Anonim)

“Beautiful faces are everywhere but beautiful minds are hard to find.”  
(Anonim)

## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan kasih sayang-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul “*Analisis Sebelum dan Sesudah Diwajibkannya Penerapan IT Inventory Terhadap Lamanya Penyelesaian Audit Kepabeanaan (Audit Delay)*” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku sekretaris Jurusan Akuntansi.
4. Bapak R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CA., CPA., selaku Pembimbing Utama atas kesediaannya untuk memberikan waktu, bimbingan, nasihat yang membangun, pelajaran dan pengalaman yang tak terlupakan selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Sc., Akt., selaku Pembimbing Pendamping atas kesediannya dalam memberikan bimbingan, pengetahuan, nasihat, pengalaman serta pembelajaran diri selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. A. Zubaidi Indra, M.M., CA., CPA., selaku Penguji Utama atas saran dan kritik, serta nasihat yang membangun baik bagi penyelesaian skripsi maupun bagi diri penulis.
7. Ibu Liza Alvia, S.E., M.Sc., Akt., selaku Pembimbing Akademik atas segala saran dan dukungan yang diberikan selama masa perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Akuntansi dan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, atas ilmu, dan pembelajaran yang telah diberikan.

9. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Audit, Pimpinan Bea dan Cukai lainnya beserta jajaran staff yang telah memberikan izin dan informasi dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
10. Yang kusayangi, kedua nenekku. Ibu Aisyah dan Ibu Mukirah. Kedua wanita tangguh yang terus memberikan doa, dukungan dan kasih sayang tak terhingga. Semoga karya kecilku ini dapat membuat nenek bangga.
11. Yang terkasih, kedua orang tuaku Bapak Kateni dan Ibu Astuti, terima kasih banyak atas lantunan doa, nasihat, kasih sayang dan dukungan yang diberikan pada setiap langkahku demi mewujudkan cita-cita. Tiada kata yang dapat menggambarkan rasa sayang dan rasa terima kasih atas segala hal yang telah diberikan.
12. Adik-adikku tersayang, Yogi Adi Wijaya dan Muhammad Farhan Nugraha, terima kasih untuk selalu menjadi motivasi dan penyemangat nomor satu untuk kakakmu ini.
13. Keluarga besar dan saudara-saudaraku, terima kasih atas segala curahan doa.
14. Bitu Parga Zen, S.Kom terima kasih untuk kepercayaan, kesempatan, dukungan, perhatian, doa dan semangatnya selama ini. Terima kasih telah mewarnai hari-hariku dengan begitu indahny.
15. Mas Panji Dirgantara, terima kasih atas dukungan, doa, perhatian dan segala bentuk bantuan yang telah diberikan.
16. Sahabat terbaik sepanjang masa, Dara Ayu Mentari, Fatma Ayu Andini, Rindy Dwi Ladista, Shanti Ananda Tanoto, Viona Yelitasari, terima kasih atas kesediannya untuk menemani, menyemangati, mengomeli, menghibur, dan membantu proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih untuk kebersamaan dalam melalui tiap cerita susah dan senang selama ini, semoga persahabatan kita berlanjut selamanya.
17. Pria-pria tangguh: Agung Prasastie, Ahmad Abdallah Alhudaifi, Gilang Andriyan, Panggih Pradila, S. Nicho Jayakusuma. Terima kasih atas semua bantuan, dukungan, nasihat, hiburan dan kebersamaan selama ini.
18. Keluarga besar HMI Cabang Bandarlampung, Komisariat Ekonomi Unila. Bang Hadi, Bang Agung, Bang Bimbim, Bang Mirham, Bang Fadli, Bang Macro, Bang Ferli, Bang Fajrin, Bang Bram, Bang Jerry, Bang Guntur, Bang



Fijar, Bang Ivan, Bang Satria, Bang Ali, Bang Jefri, Bang Dicky, Bang Annas, Bang Dimas, Bang Febi, Bang Wahyu, Mbak Nia, Mbak Fera, Mbak Dania, Mbak Sonia, Mbak Nova, Mbak Wenny, Ido, Iduy, Dany, Gita, Pandu, Odi, David, Ginan, Mersa, RH, Fadli, Findo dan seluruh anggota biasa dan anggota muda yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih telah menerimaku sebagai bagian dari keluarga HMI, yakusa.

19. Teman-teman Akuntansi 2011, Alif, Aliya, Ana, Ayas, Andin, Deri, Juna, Eja, Arum, Ayu, Oneng, Rara, Baha, Bedi, Benni, Bily, Boga, Cinta, Ucok, Deni, Puput, Dinda, Dion, Dyah, El, Farah, Fajar, Ettenkk, Feni, Mpit, Anun, Grace, Hanny, Imam, Jaka, Kartono, Kevin, Kiki, Laeina, Marce, Lisna, Wawan, Yoga, Yogi, Ridho, Maiza, Mariska, Mory, Vito, Ane, Nabilla, Nissa, Aya, Oci, Mitha, Pina, Rachmad, Laras, Restu, Rika, Riris, Santi, Sinta, Mba Jul, Opeh, Sulis, Tito, Mira, Ses, Tya, Umai, Veriza, Vianna, Bunda, dan Yuni untuk saling memberi informasi dan menyemangati.
20. Sahabat-sahabat group lawak The Kosan, Muhammad Koim, Rengga Fransseda, Romzi Iskandar dan Benny Pramulia, terima kasih untuk kesediaan waktunya menemani mengerjakan skripsi, menyemangati, mendoakan dan menghibur. Terima kasih untuk selalu siap siaga membantu penulis.
21. Dua sahabat gesrek, Muhammad Iqbal Chaniago dan Dias Putra Pambudi, terima kasih atas dukungan, semangat, nyinyiran, bantuan dan keceriaan yang telah diberikan.
22. Adikku yang cantik, Shintia Sinaga. Terima kasih tak pernah bosan menyemangati, menemani dan memahami.
23. Keluarga Just Speak Indonesia. Fadlan Satria, Aulia Afifah, Annisa Efri, Reyhan Affandi, M. Ivo Bagus Pratama, Khairunnissa, Fergany, Novita, Raissa, Rizkur, Reinaldy, Susan, Zakiyah, Alvin, Melati, Akbar, Josua. Terima kasih telah memberikan semangat, kesempatan, pengertian, keceriaan dan banyak cerita yang takkan pernah terlupakan.
24. Keluarga besar BKB Nurul Fikri, yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan.

25. Teman-teman seperjuangan HIMAKTA Unila 2013/2014. Bainal, Aul genteng, Budi, Lian, Halida, Pees, Sherly, Ani, Aau, Bedjo, Digun. Terima kasih sudah memberikan pengalaman yang begitu mengesankan serta rasa kekeluargaan yang mendalam.
26. Teman-teman seperjuangan DPM FEB Unila 2014/2015, Edo, Daus, Thoriq, Agus, yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
27. Saudara-saudara KKN Desa Adiluwih, Pringsewu: Rizal Fahmi, Ical, Udin, Farhan, Bulan, Mesa, Hayuni, April, Yolanda, Yezzie, Citra dan Netty.
28. Semua petugas administrasi gedung E: Pak Sobari, Mbak Tina, Mas Leman, Mas Yana, Mas Yogi, Mpok; dan
29. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT membalas segala amal kebbaikannya baik di dunia maupun di akhirat, amin.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam proses penyelesaian skripsi ini karena itu penulis menerima semua saran dan kritik yang membangun.

Bandar Lampung, Juni 2016

Penulis

**Vetty Riza Astika**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	iv
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah dan Batasan Masalah.....	5
1.2.1 Perumusan Masalah .....	5
1.2.2 Batasan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	7
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori .....	8
2.1.1 <i>Compliance Theory</i> (Teori Kepatuhan) .....	8
2.1.2 <i>Audit Delay</i> .....	10
2.1.3 <i>IT Inventory</i> .....	11
2.2 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis .....	13
2.3 Model Penelitian.....	18
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Data dan Sampel Penelitian.....	19
3.2 Metode Pengumpulan Data .....	21
3.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian .....	21
3.3.1 Variabel Dependen.....	22

3.3.2 Variabel Independen .....	23
3.4 Alat Analisis .....	24
3.4.1 Statistik Deskriptif .....	24
3.4.2 Uji Asumsi Klasik .....	24
3.4.2.1 Uji Normalitas .....	24
3.4.3 Pengujian Hipotesis.....	25
3.4.3.1 Uji Beda ( <i>Paired Samples t - Test</i> ).....	25

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	27
4.2 Statistik Deskriptif .....	28
4.3 Uji Asumsi Klasik .....	31
4.3.1 Uji Normalitas .....	31
4.4 Pengujian Hipotesis .....	33
4.4.1 Uji Beda t-Test Berpasangan ( <i>Paired Samples t - Test</i> ) ....	33
4.5 Pembahasan .....	35
4.5.1 Perbedaan Lamanya Penyelesaian Audit Kepabeanaan ( <i>Audit Delay</i> ) Sebelum dan Sesudah Diwajibkannya Penerapan <i>IT Inventory</i> Pada Perusahaan Penerima Fasilitas KITE yang Diaudit Tahun 2012 dan 2014 .....	35

#### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Simpulan.....	37
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	38
5.3 Saran .....	38

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran A1 : Daftar Perusahaan Sampel

Lampiran A2 : Data Perusahaan Sampel

Lampiran A3 : Perusahaan Mengalami Waktu Audit Lebih Panjang Tahun 2014

Lampiran A4 : Perusahaan Mengalami Waktu Audit Lebih Pendek Tahun 2014

Lampiran B : Analisis Data Statistik Deskriptif

Lampiran C : Uji Asumsi Klasik

Lampiran D : Hasil Uji Hipotesis

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan salah satu instansi pemerintahan yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam membangun industri nasional sangatlah penting, salah satunya dengan cara memberikan berbagai macam insentif fiskal kepada para pelaku industri. Insentif fiskal yang diberikan dapat berupa penangguhan Bea Masuk, PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut, dan PPh Pasal 22 Impor.

Fasilitas insentif fiskal salah satunya diberikan kepada perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) merupakan pemberian pembebasan dan atau pengembalian Bea Masuk (BM) atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang maupun bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. Tujuan utama dari diberikannya fasilitas KITE adalah untuk meningkatkan ekspor nonmigas. Namun tidak mudah bagi suatu perusahaan untuk memperoleh fasilitas KITE, berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.04/2013 salah satunya syarat bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas KITE adalah perusahaan tersebut harus memiliki Nomor Induk Perusahaan (NIPER).

Begitu besarnya peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam bidang kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan di wilayah kepabeanan Indonesia sebagai pengelola penerimaan negara khususnya di bidang kepabeanan dan cukai, sehingga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga perlu melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap berbagai fasilitas fiskal yang diberikan kepada para pelaku usaha selaku Wajib Pajak (WP). Pelaksanaan audit dalam bidang kepabeanan dan cukai merupakan salah satu instrumen pengawasan keuangan negara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka mengamankan penerimaan negara.

Auditor Kantor Pusat Bea dan Cukai sebagai pelaksana kegiatan audit kepabeanan dan cukai yang melakukan pemeriksaan langsung atas pembukuan seringkali mengalami kesulitan. Kesulitan dalam pelaksanaan audit yang dialami auditor dapat dilihat dari banyaknya tunggakan Laporan Hasil Audit (LHA) yang tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Target penyelesaian audit yang diberikan selama tiga bulan sejak dikeluarkannya Surat Tugas (ST) seringkali tidak dapat dipenuhi. Data rekapitulasi mengenai rentang waktu penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1 Penyelesaian Laporan Hasil Audit Tahun 2012-2014**

No.	LHA	Jumlah	Keterangan
1.	ST Thn 2012	752 buah	460 Lewat Waktu
2.	ST Thn 2013	692 buah	404 Lewat Waktu
3.	ST Thn 2014	316 buah	275 Lewat Waktu

Sumber: Kantor Pusat DJBC Tahun 2015

Tertundanya penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) tersebut diduga akan berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan negara karena dengan banyaknya Laporan Hasil Audit (LHA) yang mengalami keterlambatan penyelesaian akan menyebabkan jumlah perusahaan yang selesai diperiksa menjadi lebih sedikit, sehingga kesempatan untuk memperoleh temuan audit yang akan memberikan tambahan terhadap penerimaan negara akan lebih rendah.

Terdapat berbagai macam faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat penyelesaian LHA salah satunya adalah faktor-faktor yang berasal dari perusahaan. Pada kesempatan ini peneliti menggunakan penerapan *IT inventory* sebagai proyeksi faktor yang mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit kepabeanaan (*audit delay*).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris perbedaan sebelum dan sesudah diwajibkannya penerapan *IT inventory* terhadap lamanya waktu penyelesaian audit kepabeanaan (*audit delay*) pada perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) tahun 2012 dan 2014.



*IT inventory* merupakan sistem pencatatan persediaan berbasis komputer. Diwajibkannya penerapan *IT inventory* oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) diharapkan dapat mempermudah proses kegiatan audit kepabeanan sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya *audit delay* karena perusahaan yang telah menerapkan *IT inventory* memiliki sistem pencatatan persediaan yang lebih terintegrasi dan terkendali.

Di Indonesia, penelitian terhadap *audit delay* umumnya dilakukan di sektor bisnis. Penelitian mengenai *IT inventory* yang mulai ditetapkan sebagai salah satu syarat bagi perusahaan penerima fasilitas KITE di wilayah pabean Indonesia masih belum banyak dilakukan. Pada umumnya penelitian mengenai dampak diterapkannya suatu sistem baru pada kegiatan pembukuan perusahaan terhadap *audit delay* menggunakan variabel pengaruh penerapan *International Financial Reporting Standard (IFRS)* sebagai variabel independen. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Haryani (2014) menyatakan bahwa penerapan IFRS tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, artinya setiap auditor akan melakukan prosedur-prosedur audit yang sama pada laporan keuangan perusahaan baik yang belum maupun yang telah menerapkan IFRS, sehingga tidak mempengaruhi panjang pendeknya waktu yang dibutuhkan auditor dalam melakukan kegiatan audit. Pada penelitian yang dilakukan oleh Haryani (2014) disimpulkan bahwa diterapkannya suatu perlakuan baru pada kegiatan pembukuan perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh Che-Ahmad (2012) yang menyatakan bahwa penerapan IFRS mempengaruhi *audit delay* secara positif dan signifikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Che-Ahmad (2012) dapat diketahui bahwa diterapkannya suatu perlakuan baru dalam kegiatan pembukuan perusahaan akan berpengaruh terhadap lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses audit. Hal tersebut terjadi karena kompleksitas dalam penerapan IFRS sehingga menyebabkan waktu yang dibutuhkan auditor untuk mengaudit laporan keuangan menjadi lebih lama.

Penelitian mengenai audit kepabeanaan di Indonesia juga masih relatif terbatas, sementara wawasan mengenai *audit delay* pada audit kepabeanaan penting bagi pemakai informasi Laporan Hasil Audit (LHA) sebagai *output* dari kegiatan audit kepabeanaan. Dengan demikian pengujian mengenai dampak sebelum dan sesudah diwajibkannya penerapan *IT inventory* terhadap lamanya waktu penyelesaian audit kepabeanaan (*audit delay*) menjadi penting dan juga menjadi motivasi penelitian ini.

## **1.2 Perumusan dan Batasan Masalah**

### **1.2.1 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah perbedaan yang terjadi terhadap lamanya penyelesaian audit kepabeanaan (*audit delay*) sebelum dan sesudah diwajibkannya penerapan *IT inventory* pada perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) tahun 2012 dan 2014?

## **1.2.2 Batasan Masalah**

Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada penerapan *IT inventory* yang dimiliki oleh perusahaan terhadap lamanya waktu penyelesaian audit kepabeanan (*audit delay*).
2. Objek penelitian dibatasi pada perusahaan yang terdaftar sebagai penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) tahun 2012 dan 2014.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti adakah perbedaan yang terjadi terhadap lamanya penyelesaian audit kepabeanan (*audit delay*) sebelum dan sesudah diwajibkannya penerapan *IT inventory* pada perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) tahun 2012 dan 2014.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) penelitian ini menjadi masukan dalam kegiatan evaluasi dan pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja auditor.
2. Bagi auditor DJBC penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai dampak diwajibkannya penerapan *IT inventory* terhadap lamanya waktu penyelesaian audit kepabeanan sehingga para auditor dapat meningkatkan kinerjanya dengan cara merencanakan prosedur dan penugasan audit dengan lebih matang pada audit berikutnya.
3. Bagi para akademisi penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian-penelitian sejenis terutama penelitian dalam bidang *auditing* mengenai variabel-variabel yang signifikan menjelaskan hubungan antara penerapan *IT inventory* terhadap lamanya waktu penyelesaian audit kepabeanan (*audit delay*).
4. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya mengenai audit kepabeanan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 *Compliance Theory* (Teori Kepatuhan)**

Kepatuhan merupakan bentuk kedisiplinan dalam melaksanakan perintah, Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh adalah sifat taat pada perintah atau peraturan, serta berdisiplin. Tuntutan kepada perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) atas kepatuhan terhadap penyusunan dan penyampaian laporan keuangan maupun dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan audit kepabeanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 yaitu perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Peraturan tersebut menyatakan bahwa importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan harus dilakukan dengan baik agar menggambarkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberlakukan sistem *self assessment* dalam melakukan pemungutan pajak yaitu dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung, memotong dan menyetorkan pajaknya sendiri. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai otoritas pajak dalam hal ini bersifat pasif dan hanya memberikan penjelasan, pengawasan, dan koreksi atas kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Esya, 2008).

Sistem *self assessment* yang diterapkan sesuai Undang-Undang tersebut memberikan wewenang bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan audit di bidang kepabeanan dan cukai. Hal ini tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2008 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa audit kepabeanan dan cukai bertujuan untuk menguji kepatuhan para Wajib Pajak (WP) yaitu dengan melakukan pemeriksaan atas pembukuan, surat menyurat dan catatan persediaan barang masyarakat maupun badan usaha yang memiliki keterkaitan dalam kegiatan ekspor dan impor.

Pelaksanaan audit ini dilakukan oleh auditor Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara terpusat. Pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai dilakukan setelah barang dikeluarkan dari wilayah pabean (*post clearance audit*), sehingga para pelaku usaha diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan baik sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 28 ayat 7 disebutkan bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Atas permintaan pejabat bea dan cukai, para Wajib Pajak (WP) diharuskan untuk menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan untuk kepentingan audit kepabeanan.

### **2.1.2 *Audit Delay***

Beberapa literatur mengukur *audit delay* sebagai waktu dari akhir tahun keuangan perusahaan sampai pada tanggal pelaporan audit (Kogilavani Apadore dan Marjan Mohd Noor, 2013; Shukeri dan Sherliza, 2009). *Audit delay* yang semakin panjang menyebabkan ketepatanwaktuan (*timeliness*) laporan keuangan semakin berkurang.

Namun pada penelitian ini, peneliti menggunakan pengukuran *audit delay* berdasarkan waktu sejak tanggal surat perintah pelaksanaan audit diberikan hingga waktu diselesaikannya Laporan Hasil Audit (LHA). Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2008 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai, pelaksanaan audit harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan (90 hari) sejak tanggal Surat Tugas (ST). Pada penelitian ini peneliti membuat asumsi bahwa kondisi *audit delay* terjadi apabila

auditor belum dapat menyelesaikan Laporan Hasil Audit (LHA) yang ditugaskan kepadanya melebihi rentang waktu tiga bulan (90 hari).

### **2.1.3 IT Inventory**

Sistem informasi persediaan berbasis komputer adalah suatu sistem informasi yang dirancang dan dibangun oleh perusahaan terkait persediaan barang dengan cara mengintegrasikan sistem *input*, proses dan *output* menggunakan teknologi komputer dalam menghasilkan informasi terkait persediaan yang dibutuhkan oleh *stakeholder*. Sistem informasi persediaan merupakan salah satu subsistem dari sistem informasi akuntansi yang akan menghasilkan informasi laporan keuangan dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh *stakeholder*. Hal ini dijelaskan dalam rancangan buku pedoman Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang disusun oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Sistem informasi persediaan berbasis komputer atau yang lebih dikenal dengan *IT Inventory* harus dibuat oleh perusahaan untuk memudahkan pengawasan persediaannya sehingga persediaan lebih terjaga dan aman dari kehilangan atau hal lainnya. Selain itu *IT inventory* akan memudahkan perusahaan dalam perhitungan *costing* yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan. Sesuai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor, pada pasal 3 ayat 2 (b) dinyatakan bahwa perusahaan penerima fasilitas KITE wajib menerapkan *IT*

*inventory* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Nomor Induk Perusahaan Pembebasan (NIPER Pembebasan) fasilitas KITE.

Peraturan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2013, sehingga pada awal tahun 2012 hingga akhir tahun 2012 merupakan kondisi perusahaan penerima fasilitas KITE sebelum Peraturan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan dengan kata lain pada tahun 2012 perusahaan penerima fasilitas KITE belum diwajibkan menerapkan *IT inventory* dan tidak ada konsekuensi jika perusahaan belum menerapkan *IT inventory*. Adapun pada tahun 2014 merupakan kondisi perusahaan penerima fasilitas KITE setelah adanya intervensi Pemerintah mengenai penerapan *IT inventory* yaitu dengan diberlakukannya secara efektif Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 dengan kata lain pada tahun 2014 perusahaan penerima fasilitas KITE sudah diwajibkan menerapkan *IT inventory*. Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan tersebut, perusahaan yang belum menerapkan *IT inventory* tidak akan memperoleh NIPER dan bukan tergolong sebagai perusahaan penerima fasilitas KITE melainkan digolongkan sebagai importir umum.

Tahun 2013 tidak diikutsertakan dalam penelitian ini karena tahun 2013 merupakan tahun transisi dimana mulai dilakukannya sosialisasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pengguna jasa mengenai penerapan *IT inventory*. Penelitian ini ingin membuktikan secara empiris apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah diwajibkannya penggunaan *IT inventory* terhadap lamanya waktu penyelesaian audit kepabeanan pada perusahaan penerima fasilitas KITE yang menjadi sampel penelitian.

## 2.2 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

*IT inventory* merupakan sistem pencatatan persediaan berbasis komputer.

Diwajibkannya penerapan *IT inventory* bagi perusahaan penerima fasilitas KITE diharapkan dapat mempermudah proses kegiatan audit kepatuhan sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya *audit delay*. Penelitian ini ingin menguji ada atau tidaknya perbedaan lamanya penyelesaian audit kepatuhan (*audit delay*) sebelum dan sesudah diwajibkannya penerapan *IT inventory*. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 merupakan dasar hukum yang mewajibkan penggunaan *IT inventory* sebagai salah satu syarat perusahaan untuk memperoleh fasilitas KITE.

Penelitian terdahulu yang sejenis yaitu penelitian yang dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh penerapan suatu perlakuan baru pada kegiatan pembukuan perusahaan terhadap *audit delay* pada instansi pemerintahan dilakukan oleh Corey (2012). Corey melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh terhadap *audit delay* dan *compilation report delay* terhadap instansi pemerintahan di Mississippi yang melebihi *deadline* pelaporan Negara (tahun fiskal 2007) dengan mengajukan rumusan masalah yang dibagi ke dalam tiga faktor yaitu (1) *report message content* dan kompetensi manajerial (2) akuntabilitas dan (3) lingkungan audit. Pada bagian *report message content* dan kompetensi manajemen diproksikan dengan posisi laporan keuangan, rata-rata rasio kinerja dan jumlah temuan audit. Pada bagian akuntabilitas diproksikan dengan total utang jangka panjang dan penerapan *single audit*, sedangkan pada bagian lingkungan audit diproksikan

dengan jumlah pembiayaan besar (*major funds*) yang dilaporkan, jarak antara KAP dengan klien dan keahlian auditor. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 166 instansi pemerintahan yang terdiri atas 55 pemerintah kabupaten dan 111 pemerintah kota.

Corey menggunakan *ordinary-least-square regression* untuk menguji beberapa variabel yang mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data audit maupun *compilation report* dengan kantor auditor pemerintah. Penelitian ini juga menggunakan *logistic regression* untuk menguji pengaruh dari beberapa variabel yang mempengaruhi luasnya dampak dari pengajuan audit atau *compilation report* setelah *deadline* pengajuan surat tugas dibandingkan dengan ketepatan waktu pengajuan. Data dikumpulkan dari audit dan *compilation report* dari pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang ada di Mississippi dengan tahun fiskal 2007.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Corey menunjukkan bahwa posisi keuangan yang direfleksikan dengan rasio total asset terhadap pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay*, tetapi posisi keuangan yang direfleksikan oleh rasio perubahan asset bersih terhadap total pendapatan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap *audit delay*. Tingginya tingkat temuan audit memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap *audit delay* maupun *compilation report delay*. Jenis opini audit yang diperoleh berpengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya *audit delay*. Penerapan *single audit* tidak berpengaruh secara negatif terhadap *audit delay*. Jarak antara KAP dengan klien berpengaruh positif terhadap *audit delay* dan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap *compilation report delay*. Semakin besar jumlah utang jangka panjang tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Jumlah pembiayaan besar (*major funds*) yang dilaporkan berpengaruh negatif terhadap *audit delay* tetapi tidak signifikan dan *major funds* tidak berpengaruh terhadap *compilation report delay*. Keahlian auditor berpengaruh negatif baik terhadap *audit delay* maupun *compilation report delay*.

Salah satu variabel yang diuji dalam penelitian yang dilakukan oleh Corey adalah pengaruh penerapan *single audit* terhadap *audit delay*. Instansi pemerintahan yang menerapkan *single audit* diwajibkan mengumpulkan paket laporan auditan tidak lebih dari sembilan bulan setelah akhir tahun fiskal *auditee*. Penerapan *single audit* diukur menggunakan variabel *dummy* yaitu dengan memberikan kode angka 1 untuk instansi yang menerapkan *single audit* dan angka 0 untuk instansi yang tidak menerapkan *single audit*. Hasil penelitian Corey terhadap variabel penerapan *single audit* menunjukkan bahwa penerapan *single audit* tidak berpengaruh secara negatif terhadap *audit delay*. Artinya, baik akuntabilitas tambahan yang dibutuhkan oleh instansi yang diwajibkan menerapkan perlakuan *single audit* dalam mengumpulkan data maupun daerah pengumpulan data yang lebih sempit tidak mempengaruhi penurunan *audit delay* dalam pelaporan hasil audit.

Penelitian serupa dilakukan oleh Che-Ahmad (2012). Che-Ahmad melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh diterapkannya FRS 138 mengenai *intangible asset* terhadap *audit delay*. Dalam penelitiannya, Che-Ahmad menggunakan 2440 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia periode



2005-2008 sebagai sampel penelitian. Data sekunder berupa data finansial dan non finansial diperoleh melalui laporan keuangan tahunan masing-masing perusahaan yang dapat didownload dari Bursa Malaysia *Company Announcement Webpage*.

Che-Ahmad menggunakan *panel regression analysis* untuk menguji beberapa variabel yang diduga mempengaruhi *audit delay*. Che-Ahmad menggunakan variabel dummy untuk merepresentasikan variabel penerapan FRS 138. Angka 0 mewakili perusahaan yang belum mengadopsi FRS 138, sedangkan angka 1 mewakili perusahaan yang telah mengadopsi IFR 138 dalam penyusunan laporan keuangannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Che-Ahmad menunjukkan bahwa FRS 138 mempengaruhi *audit delay* secara positif dan signifikan. Artinya, perusahaan yang telah mengadopsi FRS 138 akan memiliki kompleksitas yang lebih tinggi sehingga auditor membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan proses audit.

Pada kesempatan kali ini, peneliti juga ingin meneliti mengenai ada atau tidaknya perbedaan kondisi dari diterapkannya suatu perlakuan baru pada kegiatan pembukuan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap *audit delay*, namun variabel yang digunakan bukan penerapan *single audit* seperti yang digunakan oleh Corey ataupun adopsi FRS 138 seperti yang digunakan oleh Che-Ahmad. Dalam penelitian ini, variabel yang akan diuji adalah penerapan *IT inventory*. Perusahaan yang telah menerapkan *IT inventory* memiliki pencatatan persediaan yang lebih terintegrasi dan terkendali sehingga memudahkan auditor dalam melakukan

proses audit. Hal ini diduga akan menjadi salah satu faktor penyebab perusahaan yang telah menerapkan *IT inventory* akan mengalami *audit delay* yang lebih pendek dibandingkan perusahaan yang belum menerapkan *IT inventory*. Sehingga hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

$H_0 =$  Diwajibkannya penerapan *IT inventory* tidak memberikan perbedaan signifikan terhadap lamanya waktu penyelesaian audit kepebeanaan (*audit delay*).

$H_1 =$  Diwajibkannya penerapan *IT inventory* memberikan perbedaan negatif signifikan terhadap lamanya waktu penyelesaian audit kepebeanaan (*audit delay*).

### 2.3 Model Penelitian

Model penelitian dirancang untuk dapat lebih memahami mengenai konsep penelitian dan arah dari hubungan kausalitas dari variabel independen dan dependen. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Pribadi (2012), konsep dalam penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana perbedaan lamanya penyelesaian audit kepabeanaan (*audit delay*) sebelum dan sesudah diwajibkannya penerapan *IT inventory*. Model penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

**Perbedaan Lamanya Penyelesaian Audit Kepabeanaan  
(*Audit Delay*) Sebelum dan Sesudah Diwajibkannya  
Penerapan *IT Inventory***

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Data dan Sampel Penelitian**

Populasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan penerima fasilitas KITE yang terdaftar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Indonesia. Peneliti memilih tahun 2012 dan 2014 sebagai tahun pengamatan serta memilih perusahaan penerima fasilitas KITE sebagai objek penelitian dengan mempertimbangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diwajibkannya penerapan *IT inventory*. Tahun 2013 tidak digunakan dalam penelitian ini karena tahun 2013 merupakan tahun transisi. Pada tahun 2013 kemungkinan besar sudah banyak perusahaan yang menerapkan *IT inventory* sebagai dampak dari sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai penerapan *IT inventory*.

Terdapat perlakuan nyata terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE jika tidak menerapkan *IT inventory* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Nomor Induk Perusahaan (NIPER) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 pasal 3 ayat 2 (b). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 mulai diberlakukan sejak tanggal 6

Desember 2013, sehingga dapat diketahui bahwa seluruh perusahaan penerima fasilitas KITE sejak awal tahun 2014 telah diwajibkan untuk menerapkan *IT inventory*. Perusahaan yang belum menerapkan *IT inventory* dalam kegiatan usahanya tidak dapat memperoleh Nomor Induk Perusahaan (NIPER) atau dengan kata lain perusahaan tersebut tidak dapat memperoleh fasilitas KITE melainkan digolongkan sebagai importir umum.

Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel yang dilakukan dengan cara memberikan kriteria-kriteria tertentu terhadap populasi sehingga dapat terpilih menjadi sampel penelitian. Kriteria yang ditentukan adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan terdaftar sebagai penerima fasilitas KITE pada tahun 2012 dan 2014.
- b. Perusahaan terdaftar sebagai perusahaan penerima perlakuan audit kepabeanan pada tahun 2012 dan 2014.
- c. Data-data mengenai variabel penelitian yang akan diteliti tersedia lengkap dalam rekapan laporan keuangan yang tercatat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode atau teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Indriantoro (2009) menyatakan bahwa data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain) misalkan bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Meskipun data dokumenter tersebut tidak dipublikasikan pada situs resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan tetapi data tersebut dapat diperoleh dengan cara mengajukan surat permohonan izin resmi dari pihak Universitas yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengakses data perusahaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian. Dengan kata lain, penelitian serupa dapat dilakukan kembali.

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari rekapan laporan keuangan dan dokumen-dokumen terkait yang berisi daftar nama perusahaan, tanggal Surat Tugas (ST) audit yang ditujukan untuk dilakukannya kegiatan audit kepabeanan bagi masing-masing perusahaan, tanggal diterbitkannya Laporan Hasil Audit (LHA) dan lamanya hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan audit kepabeanan terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE tahun 2012 dan 2014 yang menjadi sampel. Data tersebut merupakan data sekunder eksternal yang bersumber dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta.

### **3.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan, yaitu variabel bebas (*independen*) dan variabel terikat (*dependen*). Variabel bebas atau independen

dalam penelitian ini adalah penerapan *IT inventory* perusahaan penerima fasilitas KITE tahun 2012 dan 2014. Variabel terikat atau dependennya yaitu lamanya waktu penyelesaian audit kepatuhan (*audit delay*) yang terjadi pada sampel penelitian.

### 3.3.1 Variabel Dependen

Dalam penelitian ini *audit delay* menjadi variabel dependen serta menjadi variabel utama penelitian. *Audit delay* adalah jangka waktu penyelesaian audit laporan keuangan tahunan sejak tanggal tutup buku perusahaan sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen (Estrini, 2013). Namun pada penelitian ini, peneliti menggunakan asumsi pengukuran *audit delay* berdasarkan jumlah hari yang dibutuhkan sejak tanggal Surat Tugas (ST) pelaksanaan audit diberikan hingga waktu diselesaikannya Laporan Hasil Audit (LHA).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2008 tentang Tatalaksana Audit Kepatuhan dan Audit Cukai, pelaksanaan audit harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal Surat Tugas (ST) dikeluarkan. Berdasarkan kondisi tersebut peneliti mengasumsikan bahwa jika dalam rentang waktu tiga bulan auditor belum dapat menyelesaikan Laporan Hasil Audit (LHA) yang ditugaskan kepadanya, maka kondisi tersebut dikatakan sebagai *audit delay*.

$$\text{AUDTIME} = (\text{Tanggal Laporan Hasil Audit (LHA)} - \text{Tanggal Surat Tugas (ST)})$$

### 3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen dalam Bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas.

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan *IT inventory*.

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Corey (2012), yang menggunakan variabel *dummy* dalam penelitiannya untuk memproksikan instansi pemerintahan yang menerapkan sistem *single audit* dan yang tidak. Variabel penerapan *IT inventory* dalam penelitian ini diukur menggunakan variabel *dummy*. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan angka 0 untuk perusahaan penerima fasilitas KITE yang tidak mengalami penurunan *audit delay* setelah diwajibkannya penerapan *IT inventory* yaitu lamanya waktu audit yang dibutuhkan pada tahun 2014 tidak mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012, sedangkan angka 1 untuk perusahaan penerima fasilitas KITE yang mengalami penurunan *audit delay* setelah diwajibkannya penerapan *IT inventory* yaitu lamanya waktu audit yang dibutuhkan pada tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012.

### 3.4 Alat analisis

Indriantoro (2009) menyatakan bahwa analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian dilakukan. Dalam analisis ini, data-data yang dipilih dan dikumpulkan mulai diolah dan dikelola dengan menggunakan metode-metode analisis statistik dan kemudian dapat memberikan interpretasi. Data diolah menggunakan *Microsoft Excel* dan *SPSS 21.0 (Statistical Program for Social Science)*.



### 3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan analisis data yang menjadi sampel dalam penelitian. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai jumlah, rata-rata, nilai minimum dan maksimum serta deviasi standar dari data yang digunakan.

### 3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk menguji apakah model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini layak atau tidak untuk digunakan maka perlu dilakukan uji asumsi klasik dan untuk memastikan bahwa sampel yang diteliti terbebas dari gangguan normalitas sebagai syarat untuk dilakukannya uji beda.

#### 3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk menghindari terjadinya bias, data yang digunakan sebaiknya berdistribusi normal. Uji normalitas juga melihat apakah model penelitian yang digunakan sudah baik. Ghozali (2013) menyatakan bahwa model penelitian yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*.

Dasar pengambilan keputusan adalah melihat angka probabilitas, dengan ketentuan:

- Jika probabilitas  $> 0,05$  maka hipotesis diterima karena data berdistribusi normal.

- Jika probabilitas  $< 0,05$  maka hipotesis ditolak karena data tidak berdistribusi normal.

### 3.4.3 Pengujian Hipotesis

#### 3.4.3.1 Uji Beda t - Test Berpasangan (*Paired Samples t - Test*)

Uji Beda t - Test Berpasangan (*Paired Samples t - Test*) digunakan untuk menentukan apakah kedua sampel yang saling berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda (Ghozali, 2013). Uji Beda t - Test Berpasangan (*Paired Samples t - Test*) dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar *error* dari perbedaan rata-rata dua sampel atau secara rumus dapat ditulis sebagai berikut:

$$t = \frac{\text{Rata-rata sampel pertama} - \text{Rata-rata sampel kedua}}{\text{Standar } error \text{ perbedaan rata-rata kedua sampel}}$$

Tujuan dilakukannya Uji Beda t - Test Berpasangan (*Paired Samples t - Test*) adalah untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berhubungan satu dengan yang lain, apakah kedua grup tersebut memiliki nilai rata-rata yang sama ataukah tidak sama secara signifikan. Jika hasil Uji Beda t - Test Berpasangan (*Paired Samples t - Test*) menunjukkan bahwa  $t \text{ hitung} > t \text{ table}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, apabila  $t \text{ hitung} < t \text{ table}$  maka  $H_0$  diterima.

Dalam penelitian ini Uji Beda t - Test Berpasangan (*Paired Samples t - Test*) digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan mengenai lamanya penyelesaian audit kepastian (*audit delay*) sebelum dan sesudah

perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)  
diwajibkan untuk menerapkan *IT inventory*.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris apakah terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah diwajibkannya penerapan *IT inventory* oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang terdaftar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Indonesia terhadap lamanya penyelesaian audit kepabeanan (*audit delay*). Dalam penelitian ini data sekunder bersumber dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta berupa jumlah hari yang dibutuhkan auditor dalam melakukan proses audit kepabeanan pada masing-masing perusahaan yang menjadi sampel penelitian yaitu 12 perusahaan.

Berdasarkan hasil dan analisis data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat diambil simpulan bahwa pada tahun pertama penerapan *IT inventory* yaitu pada tahun 2014 terdapat perbedaan yang negatif dan signifikan terhadap lamanya penyelesaian audit kepabeanan (*audit delay*). Artinya, diwajibkannya penerapan *IT inventory* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kepada perusahaan penerima fasilitas KITE dapat secara efektif

diterapkan oleh perusahaan sehingga dapat mengurangi jumlah hari yang dibutuhkan auditor dalam melakukan proses audit kepabeanan. Perusahaan penerima fasilitas KITE yang diaudit pada tahun 2014 rata-rata mengalami waktu audit yang lebih pendek jika dibandingkan dengan waktu audit yang dibutuhkan auditor dalam melakukan proses audit kepabeanan perusahaan yang bersangkutan pada tahun 2012.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Populasi penelitian ini terbatas pada perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dengan tahun pengamatan yang terbatas yaitu tahun 2012 dan 2014 (dua tahun).
2. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen berupa penerapan *IT inventory*.

## **5.3 Saran**

Dari hasil penelitian ini, peneliti menyampaikan saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Sebaiknya kedua belah pihak yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dapat terus saling bersinergi untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan *IT inventory* sebagai salah satu instrumen yang dapat mempermudah kegiatan audit kepabeanan karena untuk menerapkan *IT*

*inventory* kedua belah pihak sudah mengeluarkan biaya yang pasti tidak sedikit jumlahnya jadi jangan sampai biaya yang telah dikeluarkan menjadi kurang bermanfaat.

2. Menggunakan periode penelitian dengan rentang waktu yang lebih panjang untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.
3. Menambah atau menggunakan variabel independen lain yang diduga mempengaruhi lamanya penyelesaian audit kepatuhan (*audit delay*) seperti variabel banyaknya jenis barang yang dimiliki perusahaan karena setiap jenis barang memiliki tarif pajak yang berbeda dan variabel klasifikasi industri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apadore, Kogilavani dan Marjan Mohd Noor. 2013. Determinants of Audit Report Lag and Corporate Governance in Malaysia. *International Journal of Business and Management*. Vol. 8, No.15.
- Cagle, Corey S. 2012. Audit And Compilation Report Timeliness In Local Governments: An Empirical Investigation Of Mississippi Governmental Entities That Exceed State Reporting Deadlines. *Dissertation*. The University of Mississippi.
- Che-Ahmad, Ayoib dan Najihah Marha Yaacob. 2012. Adoption of FRS 138 and audit delay in Malaysia. *International Journal of Economics and Finance*. Vol. 4, No. 1.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2014. *Rancangan Buku Pedoman: Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)*.
- Estrini, Dwi Hayu dan Herry Laksito. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2011). *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol. 3, No. 2.
- Esyah, Febri Purnama. 2008. Pengaruh Kompetensi Auditor dan Pemahaman Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Auditor Bea dan Cukai di Wilayah Jakarta. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Cetakan Ketujuh: Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryani, Jumratul dan Dewa Nyoman Wiratmaja. 2014. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite audit, Penerapan International Financial Reporting Standards dan Kepemilikan Publik Pada Audit Delay. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 6, No.1.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen Edisi Pertama*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2008. (2008). Tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai. Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 Tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor.

Pribadi, Januar Dona. 2012. Analisa Dampak Pemberian Fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Tesis*. Universitas Indonesia.

Shukeria, Siti Norwahida dan Sherliza Puat Nelson. 2009. Timeliness of Annual Audit Report: some empirical evidence from Malaysia. *Research Paper*. International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. (1995). Tentang Kepabeanan. Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 yaitu perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.